

## PERAN SEKOLAH UNGGUL SEBAGAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Maimunah, M.Pd.I<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Manajemen Pendidikan Islam  
Univesitas Indragiri (UNISI) Tembilahan Riau Indonesia  
[alhafizza@gmail.com](mailto:alhafizza@gmail.com)

### ABSTRAK

Sekolah merupakan sebuah tempat untuk menciptakan sumber daya manusia, Sekolah sebagai pendidikan formal bertujuan membentuk manusia yang berkepribadian dalam mengembangkan intelektual peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar sekolah memiliki daya saing yang tinggi dalam skala global, maka sekolah tersebut harus mampu melakukan pekerjaan secara lebih baik, efektif, dan efisien dalam menghasilkan output yang berkualitas tinggi. Sumber daya sekolah adalah salah satu Faktor penentu sekolah yang berkualitas. Sekolah unggulan adalah sekolah yang secara terus-menerus meningkatkan kinerjanya dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal untuk menumbuh kembangkan prestasi siswa secara menyeluruh. Ini berarti bukan hanya prestasi akademis saja yang ditumbuh kembangkan, melainkan potensi psikis, fisik, etik, moral, religi, emosi, spirit, adversity, dan intelegasi

**Kata kunci :** Sekolah Unggul, Pengembangan Sumber Daya Manusia

### PENDAHULUAN

Sekolah merupakan suatu organisasi, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, yang merupakan salah satu faktor penentu mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui lembaga ini para peserta didik, baik secara mental maupun intelektual, digembleng agar dapat mencapai mutu sesuai target yang ditetapkan oleh sekolah. Sementara itu, apabila kita amati kondisi SDM kita, kualitas manusia Indonesia yang belum begitu memuaskan telah menjadi berita rutin. Setiap keluar laporan *Human Development Index*, posisi kualitas SDM kita selalu berada di bawah. Sebenarnya, salah satu penyebab sekaligus kunci utama rendahnya kualitas manusia Indonesia adalah kualitas pendidikan yang rendah. Kualitas sosial-ekonomi dan gizi-kesehatan yang tinggi tidak akan dapat bertahan tanpa adanya manusia yang memiliki pendidikan berkualitas.

Agar suatu organisasi Pendidikan memiliki daya saing yang tinggi dalam skala global, maka organisasi tersebut harus mampu melakukan pekerjaan secara lebih baik, efektif, dan efisien dalam menghasilkan *output* yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing baik didalam maupun diluar. Untuk menghasilkan *output* yang bersaing, maka pada masa mendatang bukan lagi mengandalkan keunggulan komparatif saja, melainkan juga harus meningkatkan keunggulan kompetitif. Pengelolaan sumber daya akan memiliki keunggulan kompetitif jika sumber daya manusianya memiliki potensi yang tinggi untuk mengelola lembaga pendidikan.

Pada tataran tersebut, tugas utama sekolah ialah membantu peserta didik untuk mnggali atau menemukan, mengembangkan, dan membangun kemampuan yang akan menjadikannya berkesanggupan secara efektif untuk menunaikan tugas-tugas individu yang sosialnya pada saat sekarang dan mendatang. Untuk mencapai tugas tersebut, maka layanan pendidikan sekolah akan bersentuhan dengan berbagai pengetahuan yang tergambar dan tertuang dalam kurikulum pendidikan sekolah unggul.

Negara kita (Indonesia) sedang berjuang keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun hasilnya belum memuaskan. Kini upaya meningkatkan kualitas pendidikan ditempuh dengan membuka sekolah-sekolah unggulan, misalnya Sekolah Taruna Nusantara. Sekolah unggulan dipandang sebagai salah satu alternative yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kualitas SDM. Sekolah unggulan diharapkan melahirkan manusia-manusia unggul yang amat berguna untuk membangun Negeri. Tak dapat dipungkiri setiap orang tua tentu menginginkan anaknya menjadi anak didik yang unggul. Hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah unggulan. Setiap tahun ajaran baru sekolah-sekolah unggulan dibanjiri calon siswa, karena adanya keyakinan sekolah-sekolah tersebut bisa melahirkan manusia-manusia unggul.

Akan tetapi, benarkah sekolah-sekolah unggulan kita mampu melahirkan manusia-manusia unggul? Sebutan sekolah unggulan itu sendiri sebenarnya kurang tepat. Kata “unggul” menyiratkan adanya superioritas dibanding dengan yang lain. Kata ini menunjukkan adanya “kesombongan” intelektual yang sengaja ditanamkan di lingkungan sekolah. Di Negara-negara maju, untuk menunjukkan sekolah yang baik tidak menggunakan kata unggul (*excellent*) melainkan *effective*, *develop*, *accelerate*, dan *essential* (Susan Albers Mohtman, 1994).

Dari sisi ukuran muatan keunggulan, sekolah unggulan di Indonesia bergerak untuk memenuhi syarat sebagai sekolah unggulan yang mampu mengukur sebagian kemampuan akademis dan non akademis. Dalam konsep yang sesungguhnya, sekolah unggulan adalah sekolah yang secara terus-menerus meningkatkan kinerjanya dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal untuk menumbuhkembangkan prestasi siswa secara menyeluruh. Ini berarti bukan hanya prestasi akademis saja yang ditumbuh kembangkan, melainkan potensi psikis, fisik, etik, moral, religi, emosi, spirit, *adversity*, dan intelegasi.

## **Pembahasan**

### **a. Konsep Sekolah Unggulan**

Sekolah unggulan yang sebenarnya adalah sekolah yang dibangun secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya pemegang otoritas pendidikan. Dalam konsep sekolah unggulan yang saat ini diterapkan, untuk menciptakan prestasi siswa yang tinggi, harus dirancang kurikulum yang baik yang diajarkan oleh guru-guru berkualitas tinggi. Padahal, sekolah unggulan yang sebenarnya, keunggulan akan dicapai apabila seluruh sumber daya sekolah dimanfaatkan secara optimal. Artinya, tenaga administrasi, pengembang kurikulum disekolah, kepala sekolah, dan penjaga sekolah pun harus dilibatkan secara aktif, karena sumber daya tersebut akan menciptakan iklim sekolah yang mampu membentuk keunggulan sekolah.

Keunggulan sekolah terletak pada bagaimana cara sekolah merancang-bangun sekolah sebagai organisasi. Maksudnya adalah bagaimana struktur organisasi pada

sekolah itu disusun, bagaimana warga sekolah berpartisipasi, bagaimana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang sesuai, serta bagaimana terjadinya pelimpahan dan pendelegasian wewenang yang disertai tanggung jawab. Sementara itu bermuara pada kunci utama sekolah unggul, yaitu keunggulan dalam pelayanan kepada siswa dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya.

Menurut Suyanto, program kelas (baca: sekolah) unggulan di Indonesia secara pedagogis menyesatkan, bahkan ada yang telah memasuki wilayah malpraktek dan akan merugikan pendidikan kita dalam jangka panjang. Kelas-kelas unggulan diciptakan dengan cara mengelompokkan siswa menurut akademisnya tanpa didasari filosofi yang benar. Pengelompokan siswa ke dalam kelas-kelas menurut kemampuan akademis tidak sesuai dengan hakikat kehidupan di masyarakat. Sementara, kita ketahui bahwa kehidupan di masyarakat tak ada yang memiliki karakteristik homogen (Kompas, 2002).

Pengembangan sekolah unggulan pada dasarnya berpijak di atas empat strategi dasar kebijakan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1993, yaitu pemerataan kesempatan, relevansi, kualitas, dan efisiensi.

*Pertama*, dalam pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terkandung makna ekualitas, aksesibilitas, dan keadilan. Ekualitas berarti setiap anak berpotensi, dimana pun ia berada, mempunyai peluang yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu. Aksesibilitas berarti setiap anak berpotensi mempunyai akses yang sama terhadap sekolah yang bermutu, walaupun berada jauh dari sekolah-sekolah yang berkualitas, seperti di kota-kota besar di Jawa. Sedangkan keadilan mengandung implikasi adanya “perbedaan” perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik diperlakukan menurut kemampuan, bakat dan minatnya.

*Kedua*, dalam aspek relevansi pada hakikatnya terkandung makna “*link and match*” yang menekankan bahwa pembangunan pendidikan harus ditingkatkan keterkaitan dan kesepadanan dengan kebutuhan tuntutan pembangunan, baik kondisi saat ini maupun untuk masa datang. Kehadiran sekolah unggulan memberi peluang lebih besar terhadap upaya pengayaan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat memberikan sumbangan secara inovatif terhadap pengembangan pusat-pusat keunggulan yang sesuai dengan ciri dan potensi daerah masing-masing. Dengan demikian, penyelenggaraan sekolah unggulan ini diharapkan menyatu dengan kehidupan masyarakat, sehingga kehadirannya mempunyai sumbangan nyata dalam pembangunan dan kebutuhan daerah.

*Ketiga*, dalam aspek kualitas pendidikan merujuk pada makna kualitas dari segi proses dan produk. Suatu pendidikan disebut bermutu dari segi proses jika kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, ditunjang oleh sumber daya (manusia, dana, sarana, dan prasarana) yang memadai. Kehadiran sekolah unggulan ini merupakan intervensi sistematis yang diberikan terhadap kegiatan belajar mengajar, sehingga memberikan jaminan kualitas proses yang menyakinkan. Kualitas ini dapat diukur dari dua aspek, yaitu :

1. Peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar yang harus dikuasainya sesuai tujuan dan sasaran pendidikan diantaranya adalah hasil belajar akademis yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal).
2. Hasil pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik dalam kehidupannya, sehingga dengan belajar mereka bukan hanya mengetahui sesuatu, melainkan dapat melakukan sesuatu itu secara fungsional untuk kehidupan. Hal ini berarti bahwa kegiatan belajar di sekolah unggulan itu amat memberi penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan melanjutkan pejaran ke perguruan tinggi maupun untuk kepentingan yang memberi kemungkinan penggunaan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang selalu berubah apabila terjun ke masyarakat.

*Keempat*, dari segi efektivitas penggunaan sumber daya, keberadaan sekolah unggulan ini mempunyai nilai strategis dalam memacu keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan pendidikan.

Namun, jika boleh mengkritis, pelaksanaan sekolah unggulan di Indonesia memiliki banyak kelemahan selain yang telah dikemukakan di depan.

*Pertama*, sekolah unggulan membutuhkan legitimasi dari pemerintah, bukan atas inisiatif masyarakat atau pengakuan masyarakat. Sehingga, penetapan sekolah unggulan cenderung bermuatan politis dari pada muatan edukatifnya. Apabila sekolah unggulan didasari atas pengakuan masyarakat, maka pemerintah tidak perlu mengucurkan dana lebih kepada sekolah unggulan, karena masyarakat akan menanggung semua biaya atas keunggulan sekolah itu.

*Kedua*, sekolah unggulan hanya melayani golongan kaya, sementara golongan miskin tidak mungkin mampu mengikuti sekolah unggulan walaupun secara akademis memenuhi syarat. Untuk mengikuti kelas unggulan, selain harus memiliki kemampuan akademis tinggi, juga harus menyediakan uang jutaan rupiah. Artinya, penyelenggaraan sekolah unggulan bertentangan dengan prinsip *equity*, yaitu terbukanya akses dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati pendidikan yang baik. Keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan amat penting agar kelak melahirkan manusia-manusia unggul yang memiliki hati nurani yang berkeadilan.

*Ketiga*, profil sekolah unggulan kita hanya dilihat dari karakteristik prestasi yang tinggi berupa nilai akhir, *input* siswa yang memiliki nilai akhir tinggi, ketenagaan berkualitas, sarana prasarana yang lengkap, dana sekolah yang besar, serta kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sekolah yang kesemuanya sudah unggul. Bila bahan masuknya bagus, lalu di proses di tempat yang baik dan dengan cara yang baik pula, maka wajar saja kalau hasil keluarannya juga bagus. Yang seharusnya disebut sekolah unggulan adalah apabila masukan biasa-biasa saja atau kurang baik, tetapi diproses di tempat yang baik dengan cara yang baik pula sehingga keluarannya bagus.

Oleh karena itu, penyelenggaraan sekolah unggulan harus segera direstrukturisasi agar benar-benar bisa melahirkan manusia unggul yang bermanfaat bagi negeri ini. Bibit-bibit manusia unggul di Indonesia cukup besar karena prevalensi anak berbakat sekitar 20% yang artinya setiap 1.000 orang terdapat 20 anak berbakat (Daniel P.

Hallahan, James M. Kauffman, 1991). berdasarkan prakiraan Lembaga Demografi UI (1991), penduduk usia sekolah di Indonesia tahun 2000 diperkirakan sebesar 76.478.249, maka kita akan memiliki anak berbakat (baca:

unggul) sebanyak 1.529.565 orang. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

b. Restrukturisasi Sekolah Unggulan

Konsep sekolah unggulan yang tidak unggul, seperti yang telah dipaparkan diatas, harus segera diresrukturisasi. Restrukturisasi sekolah unggulan yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

*Pertama*, program sekolah unggulan tidak perlu memisahkan antara anak yang memiliki bakat keunggulan dengan anak yang tidak memiliki bakat keunggulan. Kelas harus dibuat heterogen sehingga anak memiliki bakat keunggulan bisa bergaul dan bersosialisasi dengan semua orang dari tingkatan dan latar belakang yang beraneka ragam. Pelaksanaan pembelajaran harus menyatu dengan kelas biasa, hanya saja siswa yang memiliki bakat keunggulan tertentu disalurkan dan dikembangkan bersama-sama dengan anak yang memiliki bakat keunggulan serupa. Misalnya, anak yang memiliki bakat keunggulan seni tetap masuk dalam kelas reguler, namun diberi pengayaan pelajaran seni.

*Kedua*, dasar pemilihan keunggulan tidak hanya didasarkan pada kemampuan intelegensi dalam lingkup sempit yang berupa kemampuan logika-matematika seperti yang diwujudkan dalam tes IQ. Keunggulan seseorang dapat dijaring melalui berbagai keberbakatan, seperti yang kini telah dikenal.

*Ketiga*, sekolah unggulan jangan hanya menjaring anak yang kaya saja, tetapi menjaring semua anak yang memiliki bakat dan keunggulan dari semua kalangan. Berbagai sekolah unggulan yang dikembangkan di Amerika justru untuk membela kalangan miskin. Misalnya *Effective School* yang dikembangkan awal 1980-an oleh Ronald Edmonds di Harvard University adalah untuk membela anak dari kalangan miskin karena prestasinya tak kalah dari keluarga kaya. Demikian pula dengan *School Development Program* yang dikembangkan oleh James Comer ditujukan untuk meningkatkan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. *Accelerated School* yang diciptakan oleh Henry Levin dari Standford University juga memfokuskan untuk memacu prestasi yang tinggi terhadap siswa kurang beruntung atau siswa berisiko. *Essential School* yang diciptakan oleh Theodore Sizer dari Brown University yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan siswa kurang mampu.

*Keempat*, sekolah unggulan harus memiliki model manajemen sekolah yang unggul, yaitu yang melibatkan partisipasi semua *stakeholder* sekolah, memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki budaya sekolah yang kuat, mengutamakan pelayanan pada siswa, menghargai prestasi setiap siswa berdasarkan kondisinya masing-masing, serta terpenuhinya harapan siswa dan berbagai pihak terkait dengan memuaskan.

Itu semua akan tercapai apabila pengelolaan sekolah telah mandiri diatas pundak sekolah sendiri, bukan ditentukan oleh birokrasi yang lebih tinggi. Saat ini amat tepat untuk mengembangkan sekolah unggulan karena terdapat dua suprastruktur yang mendukung. *Pertama*, dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana pendidikan termasuk salah satu bidang yang didesentralisasikan. Dengan adanya kedekatan birokrasi antara sekolah dan Kabupaten/Kota, diharapkan perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan sekolah unggulan semakin

serius. *Kedua*, adanya UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang didalamnya memuat bahwa salah satu program pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah terwujudnya pendidikan berbasis masyarakat/sekolah. Melalui pendidikan berbasis masyarakat/sekolah inilah warga sekolah akan memiliki kekuasaan penuh dalam mengelola sekolah. Setiap sekolah akan menjadi sekolah unggulan apabila diberi wewenang untuk mengelola dirinya sendiri dan diberi tanggung jawab penuh.

Selama sekolah-sekolah hanya dijadikan alat oleh birokrasi di atasnya (baca: kementerian pendidikan), maka sekolah tidak akan pernah menjadi sekolah unggulan. Bisa saja sekolah menjadi sekolah unggulan yang berbeda-beda berdasarkan potensi dan kebutuhan warganya. Apabila semua sekolah telah menjadi sekolah unggulan maka tidak sulit bagi negeri ini untuk bangkit dari keterpurukannya.

c. Kompetensi Guru Sebagai Aktor Utama Sekolah Unggulan

a. Pengertian Kompetensi Guru

Guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya yang merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan (*vocational*). Kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh tiga hal (keahlian, komitmen dan keterampilan) yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang ditengahnya terletak profesionalisme, walaupun kenyatannya masih dilakukan oleh orang di luar kependidikan atau orang yang ditunjang oleh profesionalisme yang matang. Itulah sebabnya jenis profesi ini paling mudah terkena pencemaran dengan dampak yang cukup kentara. Oleh sebab itu, agar dapat melakukan (*be able to do*) sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan (*ability*) dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Dilihat dari perspektif psikology, guru harus dapat melihat dengan jelas manusiawi bahwa setiap peserta didik adalah manusia yang bermartabat yang harus dihargai sepenuhnya. Dengan cara saling menghargai, dapat dibangun suatu landasan yang mengandung rasa pengertian, saling percaya, saling menghormati, dan mampu menjauhkan dari berburuk sangka dalam mengembangkan kemampuan hubungan sosial peserta didik yang sedang berada pada masa remaja (Muhammad Asrori, 2007) atau perkembangan. Dengan demikian, peran guru sangat urgen dalam perkembangan peserta didik kedepannya.

Secara sederhana dan tanpa batasan pada hal-hal yang bersifat spesifik, guru dapat didefinisikan sebagai pihak yang merupakan subjek dari pelaksanaan pendidikan (Amier Indrakusuma, t.t). Sementara itu, Maryam Rudyanto mendefinisikan guru sebagai orang yang membantu peserta didik untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai (Maryam Rudyanto, 2003)

Secara leksikal dalam Kamus Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar (Kamus Indonesia, 1993). Kata guru dalam bahasa arab disebut sebagai mualim dan dalam bahasa inggris dinamakan *Teacher* yang memiliki arti sebagai *a person whose*

*accupation is teaching others* – seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain (Muhibbin Shah,2002). Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat (1) disebutkan bahwa :

“Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (Darmaningtyas, 2004).

Sehingga, dalam konteks ini dpaat disimpulkan bahwa guru adalah tenaga professional yang pekerjaan utamanya mengajar dan mendidik sebagai bentuk pengabdian kepada komunitas belajar (*learning community*) atau dalam lingkup lebih luas kepada masyarakat, bangsa dan Negara.Dengan kesimpulan ini, maka setiap aktivitas yang dilakukan seseorang dalam konteks pendidikan akan terejawantahkan dalam bentuk sebagai fasilitator, inisiator, mediator, ataupun evaluator.

Istilah fasiliator semula lebih banyak diterapkan untuk kepentingan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), khususnya dalam lingkungan pendidikan nonformal. Namun, sejalan dengan perubahan makna pengajaran yang lebih menekankan pada aktivitas siswa, belakangan ini di Indonesia istilah fasilitator pun mulai diadopsi dalam lingkungan pendidikan formal disekolah, yakni berkenaan dengan peran guru pada saat melaksanakan interaksi belajar mengajar. Wina Senjaya menyebutkan bahwa sebagai fasilitator, guru berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran (Wina Sanjaya, 2008).

Peran guru sebagai fasilitator membawa konsekuensi terhadap perubahan pola hubungan guru-siswa yang semula lebih bersifat “*top-down*”, ke hubungan kemitraan. Dalam hubungan yang bersifat “*top-down*”, guru sering kali diposisikan sebagai “atasan” yang cenderung bersifat otoriter, sarat dengan nilai komando, instruksi bergaya birokrat, bahkan pawing. Sementara, siswa lebih diposisikan sebagai “bawahan” yang harus selalu patuh pengikuti instruksi dengan segala sesuatu yang dikehendaki oleh guru.

Berbeda dengan pola hubungan “*top-down*”, dalam hubungan kemitraan antara guru dan siswa, guru bertindak sebagai pendamping belajar para siswanya dengan suasana belajar yang demokratis dan menyenangkan. Sebab, guru adalah orang yang langsung berinteraksi dengan anak didik, memberikan keteladanan, motivasi, dan inspirasi untuk terus menerus bersemangat dalam berkarya dan berprestasi (Jamal Asmani, 2009). Oleh karena itu, agar guru dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator, seyogyanya guru dapat memenuhi prinsip-prinsip belajar yang dikembangkan dalam pendidikan kemitraan. Guru harus memahami bahwa siswa akan belajar dengan baik apabila :

- a. Siswa secara penuh dapat mengambil bagian dalam setiap aktivitas pembelajaran;
- b. Apa yang dipelajari bermanfaat dan praktis (*usable*);
- c. Siswa mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh pengetahuan dan keterampilannya dalam waktu yang cukup;

- d. Pembelajaran dapat mempertimbangkan dan disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya serta daya pikir siswa;
- e. Terbina saling pengertian, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa.

Di sekolah, peranan suatu kompetensi guru dalam mengajar mata pelajaran yang diajarkannya kepada siswa sangat penting dalam menentukan prestasi belajar siswa. Artinya, guru yang berkompotensi baik dalam mengajar maka prestasi belajar siswa pun diharapkan akan baik pula. Dan sebaliknya, jika guru kurang baik kompetensinya dalam mengajar, maka prestasi belajar siswa yang diajarkan akan kurang baik pula. Oleh karena itulah, baik para guru maupun pihak sekolah yang dalam hal ini kepala sekolah, hendaknya berupaya dalam menjaga atau meningkatkan kompetensi guru agar tujuan pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR Nomor :II/MPR/1993 Tanggal 3 Maret 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dapat terwujud.

Salah satu factor penting yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang diamanatkan oleh ketetapan MPR Nomor : II/MRP/1993 adalah guru yang berkopoten dalam mengajar. Untuk memahami pengertian kompetensi dalam mengajar, berikut akan diungkapkan pendapat dari beberapa pakar.

Menurut Subandiah, kompetensi mengajar adalah kemampuan guru dalam menciptakan suasana pengajaran yang kondusif, sehingga memungkinkan dan mendorong peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya guna mencapai tujuan yang ditentukan (Subandiah, 1993).

Tugas dan tanggung jawab guru berkaitan erat dengan kemampuan yang disyaratkan untuk memangku jabatan sebagai guru, sehingga ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kemampuan dasar yang dimaksud adalah kompetensi guru. Secara leksikal, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu) (Kamus Indonesia, 1999).

Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry mengartikan kompetensi sebagai kecakapan, kewenangan, kekuasaan dan kemampuan (Pius Partanto dan M. Dahlan, 1994). Mc. Ashan, seperti yang dikutip oleh E. Mulyasa, mengartikan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, efektif, dan psokomotorik dengan sebaik-baiknya (E. Mulyasa, 2003). Sedangkan menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045/U/2002 Pasal 1, Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu (Sutrisno, 2005).

Jadi, dalam konteks ini, kompetensi guru dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai hasil pembelajaran. Sehingga, Moh. Uzer Usman mengatakan bahwa guru professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia

mampu melakukan tugas an fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal (Uzer Usman, 2005).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat secara jelas bahwa dari kemampuan, pemikiran, pengetahuan, serta keterampilan seseorang guru dalam proses mengajarnya akan terlihat pula kompetensi mengajarnya. Mengajar merupakan tugas yang berat bagi guru karena langsung berhadapan dengan sekelompok siswa yang memerlukan bimbingan dan pembinaan menuju kedewasaan. Mengingat tugasnya yang berat dan sangat penting ini, maka guru yang mengajar di depan kelas harus mempunyai prinsip-prinsip mengajar dan harus dilaksanakan seefektif mungkin, sehingga kompetensi pengajarannya menjadi lebih baik. Adapun prinsip-prinsip mengajar itu antara lain :

- a. Perhatian. Didalam mengajar, guru harus dapat membangkitkan perhatian siswa terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru.
- b. Aktivitas. Dalam proses belajar mengajar perlu dilakukan upaya untuk menimbulkan aktivitas siswa dalam mengutarakan pendapat maupun berbuat.
- c. Apersepsi. Setiap guru yang mengajar perlu menghubungkan pelajaran yang diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa maupun pengalamannya.
- d. Materi. Dalam mengajar, guru harus mengetahui dengan baik materi yang dibahas. Karena, jika tidak menguasai materi yang akan diajarkan, guru tersebut akan kesulitan menguasai kelas.
- e. Repetisi. Bila guru mengajar maka harus menjelaskan sesuatu unit pelajaran dengan diulang-ulang agar siswa menjadi jelas dalam menangkap materi pelajaran.
- f. Motivasi. Guru dalam mengajar harus memperhatikan apa yang dapat mendorong siswa menjadi lebih bersemangat ketika pelajaran sedang berlangsung.
- g. Konsentrasi. Hubungan, cara menilai, atau memberi nilai berupa huruf atau angka (Kamus Bahasa Indonesia, 1993) atau pemusatan pikiran/perhatian (Pius A. Partanto dan M. Dahlan, 1994) Jadi, yang adalah penilaian yang dilakukan siswa terhadap kualitas pengajaran guru. Mata pelajaran dapat dipusatkan pada salah satu pusat minat, sehingga siswa bisa memperoleh pengetahuan secara luas dan mendalam.
- h. Sosialisasi. Dalam perkembangan, siswa perlu bergaul dengan teman lainnya. Disamping sebagai individu, siswa juga mempunyai segi social yang perlu dikembangkan.
- i. Menentukan tujuan pelajaran. Dalam menentukan materi pelajaran guru harus mengetahui tujuan dari pelajaran tersebut, sehingga ketika menerangkan tidak menyimpang dari yang telah ditentukan.
- j. Evaluasi. Semua kegiatan belajar mengajar perlu dievaluasi. Evaluasi dapat memberi motivasi bagi guru maupun siswa karena mereka akan lebih giat belajar dan meningkatkan proses berpikirnya.

b. Aspek-aspek Kompetensi Guru.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogic menunjuk pada kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian menunjuk pada kemampuan kepribadian yang mantap, berkahlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi professional menunjuk pada kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan

Pirt A. Sahertian menjelaskan bahwa kompetensi guru mengandung berbagai pengertian. *Pertama*, kemampuan guru untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. *Kedua*, ciri hakiki dari kepribadian guru yang menuntunnya ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah di tentukan. *Ketiga*, perilaku yang dipersyaratkan untuk mencapai tujuan pendidikan (Piet A. Sahertian, 1994).

Dari pengertian tersebut, ada tiga aspek dari kompetensi, ada tiga aspek dari kompetensi, yaitu aspek personal, aspek social, dan aspek propesional. Dalam banyak analisa tentang pentensi guru, aspek personal dan aspek sosial umumnya disatukan. Hal ini dikarenakan sosialisasi manusia, termask guru, dapat dipandang sebagai pengejawantahan dari pribadinya.

a. Kompetensi personal dan social

Yang dimaksud dengan kompetensi personal adalah kemampuan dan ciri-ciri yang ada dalam diri guru yang dapat mengembangkan kondisi sehingga hasil belajar dapat dicapai dengan efektif (Zakiah Drajat, 1982).

Depertemen pendidikan dan kebudayaan dalam buku panduan Pembinaan kompetensi mangajar, menjelaskan ada tiga hal yang memberikan ciri kompetensi personal guru, yaitu kepribadian, penampilan, dan kepemimpinan (Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987).

Ada beberapa ciri kepribadian yang mestinya dimiliki seorang guru, yaitu kempuan interaksi social yang hangat; memiliki rasa hangat; memiliki rasa tanggung jawab; memiliki kejujuran, objektif, tegas dan adil; serta demokrasi.

Kepribadian yang menyangkut masalah psikis tampak dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamatisecara lahiriah dalam pergaulan bersama. Tingkah laku guru pada umumnya merupakan penampilan lain dari kepribadiannya. Kemampuan pribadi seorang guru tampak dari sifat bekerja sama dengan demokratis, penyayang, menghargai kepribadian peserta didik, sabar, menyenangkan, serta berakhlak baik, adil, toleran, mantap dan stabil, peka terhadap persoalan peserta didik, mampu menghargai anak didik serta mampu memimpin secara baik.

Moh. User Usman secara lebih rinci lagi menjelaskan tentang kemmpuan personal guru yang mencakup hal-hal berikut :

- 1) Mengembangkan kepribadian, seperti :
  - a) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b) Berperan dalam masyarakat sebagai warga Negara yang berjiwa Pancasila; dan
  - c) Mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru.
- 2) Berinteraksi dan berkomunikasi, seperti :
  - a) Berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan professional; dan

---

mendalam. Kompetensi social menunjuk pada kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesame guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Lebih detailnya, lihat dalam undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- b) Berinteraksi dengan masyarakat untuk pencapaian misi pendidikan.
- 3) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, seperti :
  - a) Membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar; dan
  - b) Membimbing siswa yang mengalami permasalahan.
- 4) Melaksanakan administrasi sekolah, seperti :
  - a) Mengenal pengadministrasian kegiatan sekolah; dan
  - b) Melaksanakan kegiatan administrasi sekolah.
- 5) Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran, seperti :
  - a) Menmemberikan konsep dasar penelitian; dan
  - b) Melaksanakan penelitian sederhana (Uzer Usman, 2005).

Sementara itu, A. Samana mendeskripsikan kemampuan personal dan social guru dalam proses belajar mengajar sebagai berikut :

“Menghayati serta mengamalkan nilai hidup termasuk nilai keimanan dan moral, bertindak jujur dan bertanggung jawab, berperan sebagai pemimpin, bersikap bersahabat dan terampil berkomunikasi, menghargai pribadi orang lain, kreatif, disiplin, bermental sehat dan stabil, serta berperan serta dalam berbagai kegiatan social, baik dalam lingkup kesejawatan maupun masyarakat.” (A.Saman, 1994).

Kompetensi personal dan social seorang guru merupakan modal dasar bagi guru yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas keguruan secara professional. Kegiatan pendidikan pada dasarnya merupakan kekhususan komunikasi antara guru dan siswa.

b. Kompetensi Profesional

Kemampuan mengajar merupakan kemampuan esensial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan mengajar sebenarnya merupakan pencerminan penguasaan guru atas kompetensi professional sebagai pengajar dan pendidik. Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) Depdikbud telah merumuskan kompetensi professional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Rumusan tersebut oleh Ali Imran disimpulkan menjadi tiga kategori, yaitu kemampuan merencanakan proses belajar mengajar, dan kemampuan melaksanakan program tersebut (Cece Wijaya dan Tabrani Rusman,1991).

Kemampuan menguasai bahan bidang studi adalah kemampuan mengetahui, memahami, mengimplikasikan, menyintesis, dan menguasai sejumlah pengetahuan keahlian yang akan diajarkan. Penguasaan ini menjadi landasan pokok seseorang guru dalam melaksanakan tugas pengajaran. Sebelum melaksanakan pengajaran, maka terlebih dahulu guru harus dapat membuat perencanaan pengajaran. Sehingga, kemampuan merencanakan program belajar mengajar pada intinya adalah kemampuan membuat satuan pelajaran (SP) atau perencanaan pengajaran yang berbobot. Sedangkan kemampuan melaksanakan program belajar mengajar adalah kemampuan menciptakan interaksi belajar mengajar sesuai dengan situasi dan kondisi serta program yang dibuatnya. Kemampuan ini merupakan penerapan secara nyata rencana pengajaran yang telah dibuat pada saat perencanaan pengajaran.

Menurut Moh. Uzer Usman, secara garis besar, kompetensi professional guru meliputi lima hal, yaitu :

- 1) Menguasai landasan pendidikan, mencakup :
  - a) Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
  - b) Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat; dan

- c) Mengetahui prinsip-prinsip psikologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar.
- 2) Mengetahui bahan pengajaran, mencakup :
  - a) Mengetahui bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah,
  - b) Mengetahui bahan pengajaran.
- 3) Menyusun program pengajaran, mencakup :
  - a) Menetapkan tujuan pengajaran;
  - b) Memilih mengembangkan bahan pengajaran;
  - c) Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar;
  - d) Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai; serta
  - e) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar.
- 4) Melaksanakan program pengajaran, mencakup :
  - a) Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat;
  - b) Mengatur ruang belajar, dan
  - c) Mengelola interaksi belajar mengajar.
- 5) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan
  - a) Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran, serta
  - b) Menilai prestasi belajar mengajar yang telah dilaksanakan (Uzer Usman, 2005).

## **PENUTUP**

Tugas utama sekolah ialah membantu peserta didik untuk menemukan, mengembangkan, dan membangun kemampuan yang akan menjadikannya berkesanggupan secara efektif untuk menunaikan tugas-tugas individu dan sosialnya pada saat sekarang dan mendatang. Untuk mencapai tugas tersebut, maka layanan pendidikan sekolah akan bersentuhan dengan pelbagai pengetahuan yang tergambar dalam kurikulum. Negeri kita Indonesia sedang berjuang keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun hasilnya belum memuaskan. Kini upaya peningkatan kualitas pendidikan ditempuh dengan sekolah-sekolah unggulan, sekolah unggulan dipandang sebagai salah satu alternatif yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kualitas sumber daya manusia (SDM).

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abimayu, Bola, 1998, *Keterampilan Bertanya dan lanjutan*, Jakarta: P2LPTK.

Asmani, Jamal Ma'ruf. 2009, *Manajemen pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional: Panduan Quality Control Bagi para Pelaku Lembaga Pendidikan*, Yogyakarta :DIVA press.

Asrori Muhammad .2007 *psikologi Pembelajaran*. Bandung Wacana Prima.

Afkari Rafiuddin Afkari. Marfuah. Membangun Pendidikan Indonesia permasalahan dan solusinya. *Internasional.conference Proceedings*. Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri.

- Azhari,Ahmad.2003..*Supervisi Rencana Program Pembelajaran*,Jakarta: Rian Putra
- Darmaningtiyas,dkk.2004..*Membongkar Idiologi pendidikan jelajah Undang-undang Sistem Pendidikan nasional* Yogyakarta Ar-Ruzz.Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1993 *Pedomam Pengelolaan Administrasi Sekolah*.Jakarta; Dirjen Pendidikan Dasar Menegah,Drektorat Saana Pendidikan.
- Djamarah Syaiful Bahri.1994. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*.Surabaya: usaha Nasioanl.
- Hakim, Thursan. 2001. *Belajar secaa Efektif* .Jakarta: Puspa swarsa.
- Hallahan, Daniel P. dan James M.Kauffman.1991..*Exceptional Children: Intruduksion To Spesial Education*, New Jersey: Prentice-Hall Internatioanal.Inc
- Hamalik, Umar.1990. *Evaluasi Kurikulum*. Bamdung : Remaja Rosdakarya.
- Indarakusuma, Amir Daein.2000..*Pengantar Ilmu Pendidikan sebuah Tinjauan Teoritis-Filosofis*.Surabaya: Usaha Nasional.
- Mohraman, Susan Albers. 1994. *School – Based Manageme: Organizing For Hig Perpormance* . Sanfransisco; Jossey Bass.
- Mulyasa, E. 200003. *Kurikulum berbasis Kompetensi; Konsep Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung : remaja Rosdakaya.
- Purwnato, M. Ngalim.200 *Psikologi Pendidikan*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Saman,A. 1994, *Profesionalisme Keguruan*. Yogyakarta: kanisius
- Sanjaya, Wina 2008. *Stretegi Pembelajaran: Berorentasi Standar Poses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Sarwono,Sarlito Wirawan 2005, *Teori-teoriPsikologis Sosial Jakarta*: Raja Grafindo Persada.
- Suriadi,D. 1998. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sutrisno. 2005. *Revolusi Pendidikan di Indonesia : Membedah Metode dan Tehnik Pendidikan berbasis Kompetensi*. Yogyakarta Ar-Ruzz Media.
- Syah,Muhibbin. 2002. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan baru*. Bandung; Remaja rosdakarya.
- Tim Penyusun, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; balai Pustaka.
- Uno, Hamzah B. 2008 *Orientasi dalam Psikologi Pembelajaran* Jakarta: bumi Asara.
- Usman. Moh Uzer.2005. *Menjadi Guru Pofesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Imam gojali. Umiarso.2010 Manajemen Mutu Sekolah Jogjakarta: IRCiSoD

Wardani,I.G.K. 1998. *Pemantauan kemampuan mengajar*, Jakarta; Universitas Terbuka.